
MEMBANGUN MASYARAKAT PARTISIPATIF DENGAN APLIKASI PINTAR DI ERA KEBIJAKAN PUBLIK

Ridwan Kurnia Rahim¹, Dana Mulanda², Kennywan Leo Arischa³, Aldri Frinaldi⁴, Syamsir⁵,
Nora Eka Putri⁶

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: kurniarahim84@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has had a significant impact on the transformation of modern society, especially in the context of public policy. This research aims to explore and analyze how the implementation of smart applications can be a catalyst in building a participatory society in the era of public policy. This study focuses on the role of smart applications as a tool to increase citizen involvement in public decision-making processes. Through literature analysis and empirical studies, this research tries to identify key factors that support the successful implementation of smart applications in increasing community participation. The research results show that smart applications can facilitate faster access to information, enable two-way communication between government and society, and provide a platform for active collaboration. People who are involved in using smart applications tend to have a better understanding of public policy and feel more involved in the decision-making process. However, the research also highlights several challenges that need to be addressed, such as uneven technology accessibility, privacy concerns, and differences in digital literacy levels among members of society. Therefore, there needs to be continued efforts from the government, private sector and society to ensure that the implementation of smart applications runs inclusively and evenly. This research concludes that building a participatory society with smart applications in the era of public policy is a positive step in increasing policy effectiveness and strengthening relations between government and society. Although challenges exist, the positive potential of integrating technology in participatory processes points to a promising direction for realizing a society that is more democratic and responsive to collective needs.

Keywords: Participatory Society, Smart Applications, Public Policy.


Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam transformasi masyarakat modern, terutama dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana implementasi aplikasi pintar dapat menjadi katalisator dalam membangun masyarakat partisipatif di era kebijakan publik. Studi ini fokus pada peran aplikasi pintar sebagai alat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui analisis literatur dan studi empiris, penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi aplikasi pintar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pintar dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih cepat, memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan platform untuk kolaborasi aktif. Masyarakat yang terlibat dalam penggunaan aplikasi pintar cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan publik dan merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Namun, penelitian juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti aksesibilitas teknologi yang tidak

merata, kekhawatiran privasi, dan perbedaan tingkat literasi digital di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa implementasi aplikasi pintar berjalan secara inklusif dan merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa membangun masyarakat partisipatif dengan aplikasi pintar di era kebijakan publik merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun tantangan ada, potensi positif dari integrasi teknologi dalam proses partisipatif menunjukkan arah yang menjanjikan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan kolektif.

Kata Kunci: Masyarakat Partisipatif, Aplikasi Pintar, Kebijakan Publik

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, aplikasi pintar atau yang sering disebut dengan aplikasi mobile telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Aplikasi tersebut tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi juga telah membuka peluang baru dalam partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks ini, membangun masyarakat partisipatif dengan menggunakan aplikasi pintar memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

Salah satu aspek penting dari membangun masyarakat partisipatif melalui aplikasi pintar adalah memfasilitasi akses informasi dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya aplikasi pintar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan publik, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai contoh, sebuah aplikasi dapat memungkinkan warga untuk memberikan masukan terkait rencana pembangunan di lingkungan mereka, atau memberikan tanggapan terhadap kebijakan tertentu yang sedang dibahas oleh pemerintah.

Selain itu, aplikasi pintar juga dapat memungkinkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, aplikasi dapat digunakan untuk mengorganisir kegiatan sukarela, melaporkan masalah lingkungan, atau bahkan memberikan akses langsung ke layanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam membangun masyarakat partisipatif dengan menggunakan aplikasi pintar. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas dan inklusivitas. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkan aplikasi tersebut tanpa terkecuali.

Hampir setiap industri di era digital modern pasti memiliki teknologi digitalisasi, termasuk sistem pemerintahan. Istilah “digitalisasi” terkait erat dengan wacana industri. Berbeda Jenis digitalisasi ini sangat menyederhanakan semua tugas. (Araujo, Sunarsi, Paramarta, & Priadana, S., 2021) Sederhananya, digitalisasi adalah proses menjadikan teknologi semakin mirip dengan teknologi digital. Tentu saja, tujuan digitalisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap aspek kinerja industri organisasi, sehingga memungkinkan pemrosesan yang paling efisien dari semua sumber daya yang tersedia. (Verihubs, 2022) Sukmana dalam Erwin mengartikan digitalisasi sebagai konversi media

tertulis, audio, atau video ke dalam format digital. Sebaliknya, istilah “teknologi” berasal dari kata Yunani “*technologia*,” yang mengacu pada segala sesuatu yang direncanakan atau dirancang untuk membantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan mencapai hasil yang diinginkan melalui hubungan sebab akibat. Akal, pemikiran, dan kecerdasan manusia terwakili dalam kemajuan ilmu pengetahuan, yang meningkatkan seluruh aspek kehidupan manusia, dan begitulah teknologi digital berkembang. Informasi dapat disebarluaskan dengan lebih mudah berkat digitalisasi, sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkannya. (Pada tahun 2023, Wiranti dan Frinaldi).

Teknologi mempunyai pengaruh terhadap berbagai pekerjaan, dan beberapa pekerjaan akan menjadi ketinggalan jaman. Menurut Astomo (2019), sembilan pekerjaan diperkirakan akan hilang dalam waktu dekat: telemarketer, akuntan, pialang saham, pengemudi, petani, penerbit/percetakan, kasir, pegawai bank, dan telemarketer. Kemajuan Teknologi juga berdampak langsung pada tugas administrasi perkantoran di gedung-gedung pemerintah. Karena teknologi selalu berkembang dan terkadang bahkan revolusioner, kantor harus terus-menerus menggunakan dan beradaptasi dengannya. Paradigma partisipasi masyarakat mengalami pergeseran, dengan menekankan pada pengelolaan yang berfokus pada pelanggan (pemerintahan yang dimotivasi oleh tuntutan rakyatnya), yang sejalan dengan kemajuan penyelenggaraan negara dalam mencapai partisipasi yang unggul dan berkualitas. Tindakan memberikan kenyamanan dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya akan efektivitas biaya, efisiensi, dan efektivitas (Suwondo, 2018)

Karena adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif, maka keterlibatan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang prima. Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan, seorang birokrat harus mempunyai jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih luwes dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan praktis. Masyarakat berpendapat bahwa “Untuk memberikan dukungan informasi bagi penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional” (RI, 2009, p. 2). Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat 4 untuk mengelola sistem informasi yang mencakup komponen elektronik dan non-elektronik dan paling sedikit terdiri dari pengelolaan pengaduan, tinjauan kinerja, standar pelayanan, pengumuman, pelaksana. profil, dan profil penyelenggara. membahas keterlibatan publik dalam kebijakan secara rinci, khususnya ketika membicarakan faktor-faktor yang memotivasi partisipasi.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan kontribusi warga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, atau ekonomi di suatu komunitas. Partisipasi masyarakat mencakup berbagai tindakan, mulai dari memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan hingga berkontribusi dalam proyek-proyek lokal. Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk partisipasi dalam pertemuan komunitas, aksi sukarela, memberikan masukan pada kebijakan publik, dan pemanfaatan teknologi untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat meliputi aksesibilitas informasi, keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi, tingkat literasi masyarakat, dan rasa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam konteks demokrasi, karena melibatkan warga dalam proses pembuatan keputusan dapat menciptakan kebijakan yang lebih representatif dan mendukung kebutuhan kolektif.

Dalam konteks penggunaan aplikasi pintar di era kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui platform digital yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara lebih efisien dan inklusif. Aplikasi pintar dapat menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, memberikan umpan balik, dan berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam konteks teknologi informasi menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Aplikasi pintar, atau sering disebut juga dengan aplikasi cerdas atau smart apps, merujuk pada perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat pintar seperti smartphone, tablet, atau perangkat pintar lainnya. Aplikasi pintar memiliki tujuan untuk memberikan fungsionalitas tambahan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan konektivitas internet.

Konektivitas aplikasi pintar sering kali terhubung ke internet untuk mengakses data secara real-time, berkolaborasi dengan pengguna lainnya, atau menyediakan pembaruan informasi dan memberikan pengguna kemampuan untuk berinteraksi dengan kontennya, baik melalui antarmuka grafis, suara, atau sensor-sensor pada perangkat pintar. Beberapa aplikasi pintar dapat memberikan fungsi pemantauan dan kendali, seperti aplikasi rumah pintar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat elektronik di rumah mereka. Integrasi Sensor dapat memanfaatkan sensor-sensor perangkat pintar, seperti GPS, accelerometer, dan sensor lainnya, untuk menyediakan layanan yang lebih kontekstual. Kecerdasan Buatan (AI)

dan Pembelajaran Mesin menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memberikan pengalaman yang personal dan adaptif.

E-commerce dan Layanan Finansial sering digunakan dalam e-commerce untuk berbelanja online dan dalam layanan finansial untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran digital. Ada kaitannya dengan kesehatan dan kebugaran dapat membantu pengguna dalam memantau kesehatan dan kebugaran mereka melalui pengukuran aktivitas fisik, tidur, dan aspek kesehatan lainnya. Serta Pendidikan dan Pembelajaran yang dirancang untuk menyediakan platform pembelajaran online, kursus, dan sumber daya Pendidikan dengan menyediakan layanan navigasi, transportasi umum, dan informasi lalu lintas untuk membantu pengguna dalam perjalanan mereka.

Aplikasi pintar memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan keterlibatan pengguna dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi terus memperluas kemungkinan dan fungsionalitas aplikasi pintar, membawa dampak signifikan dalam transformasi digital masyarakat modern.

Pentingnya kebijakan publik menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan sebagainya. Proses perumusan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi dampak kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa elemen kunci terkait kebijakan publik:

1. Perumusan Kebijakan. Tahap awal dalam siklus kebijakan di mana pemerintah mengidentifikasi permasalahan yang perlu diatasi dan merancang strategi untuk mengatasinya.
2. Implementasi, Melibatkan eksekusi kebijakan yang telah dirumuskan, melibatkan berbagai badan pemerintah, lembaga, dan pihak terkait.
3. Evaluasi. Penilaian dampak kebijakan setelah diimplementasikan untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya.
4. Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan.
5. Aspek Hukum. Kebijakan publik harus sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

6. Siklus Kebijakan. Proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dianggap sebagai siklus yang berulang, di mana pembelajaran dari evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan di masa depan.
7. Keseimbangan Kepentingan. Kebijakan publik sering kali harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat.
8. Transparansi. Informasi mengenai kebijakan publik harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung partisipasi dan akuntabilitas.

Teknologi mungkin memainkan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan standar layanan. Digitalisasi misalnya, dapat memudahkan konsumen memperoleh informasi atau layanan dengan cepat sehingga menghasilkan layanan yang lebih berkualitas. Pemerintah dapat memanfaatkan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan negara sebagai dampak dari tren digitalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik digitalisasi memfasilitasi keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan di bidang kenegaraan. Belum lagi menyadari tantangan dalam memasukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan negara di era digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, berdasarkan analisis dan sintesis informatika dari berbagai sumber literatur yang membahas permasalahan penelitian (Sugiyono, 2017). Peneliti dapat mengidentifikasi solusi terhadap masalah yang ada dan menjawab pertanyaan mereka secara tepat dengan menggunakan SLR (System Literature Review), yang merupakan metodologi penelitian. mencakup penilaian dan interpretasi semua temuan studi terkait dengan situasi problematis. Ada tiga tahap perencanaan SLR, dimulai dengan menentukan kebutuhan penelitian literatur, yaitu tindakan mencari bahan-bahan sastra dengan menggunakan media pencarian. Dan terakhir, menulis laporan dan menciptakan karya sastra yang terorganisir dengan baik. Setelah membaca beberapa literatur, data dipilah dan diperiksa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Membangun Masyarakat Partisipatif dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku, berita, makalah jurnal, dan materi terkait. Moleong (2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun masyarakat partisipatif telah menjadi tujuan utama dalam era kebijakan publik. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi pintar telah menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Dalam artikel ini, kita akan membahas hasil dan pemikiran yang muncul dari upaya membangun masyarakat partisipatif melalui penggunaan aplikasi pintar di era kebijakan publik.

Salah satu hasil positif dari penggunaan aplikasi pintar adalah peningkatan aksesibilitas informasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan aplikasi pintar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan publik, serta memberikan masukan dan umpan balik secara langsung. Contohnya adalah penggunaan aplikasi untuk survei online, forum diskusi, atau platform pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan.

Penggunaan aplikasi pintar juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Dengan adanya platform yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat memantau proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan secara langsung. Hal ini dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi aplikasi pintar untuk membangun masyarakat partisipatif juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi, di mana tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan partisipasi antara masyarakat yang terhubung dengan teknologi dan yang tidak.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk proses politik, mencakup partisipasi individu dan kelompok oleh warga negara (yang tidak mempunyai kekuasaan) dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka di tingkat pemerintahan (Surbakti, 2010). Secara umum, pengetahuan politik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan dua aspek utama yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan politik. Kondisi yang Menetapkan: Ada beberapa alasan mengapa keterlibatan publik yang aktif merupakan situasi yang diinginkan, termasuk: sebagai sarana untuk menantang pemerintah dan otoritas dalam rangka mewujudkan perubahan struktural dan sistem politik, serta membantu pemerintah dan otoritas dengan menonjolkan kekurangan pemerintah (Ricky, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterlibatan masyarakat diperlukan

untuk mempercepat pemenuhan kesejahteraan (RI, 2014). Selain itu, Pasal 354 mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan: (1) Menyediakan informasi bagi masyarakat, yang dapat dicapai melalui sistem informasi, media cetak dan elektronik, papan pengumuman, atau dengan mengajukan permintaan langsung ke daerah terkait. pemerintah. (2) Lembaga dan tata cara pengambilan keputusan yang memungkinkan partisipasi efektif dan aktif kelompok dan organisasi masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, kemampuan untuk mengekspresikan pikiran secara bebas melalui media elektronik semakin berkembang, yang membantu virtualisasi demokrasi. Pembangunan adalah salah satunya. Petisi online memungkinkan orang atau kelompok dengan mudah mengadakan petisi online dan mengumpulkan dukungan secara digital. Salah satu bentuk implementasi digital dan pembaharuan saluran komunikasi dan informasi (Rajagukguk, 2021). Teknologi mendorong proses digitalisasi, yang dapat membantu keterlibatan dan komunikasi publik serta meningkatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Individu yang tertarik pada pilihan pemerintah atau isu yang muncul merasa terdorong untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dan pemerintah yakin bahwa mereka mempunyai hak suara yang besar terhadap pilihan dan tindakan yang diambil, maka mereka akan terlibat dalam permasalahan tersebut. Kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tingkat pengumpulan. Efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada keputusan yang diambil pemerintah dan cara perumusannya.

3.1. Efektivitas Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah di Era Digitalisasi

Dalam era digitalisasi saat ini, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah telah menjadi semakin penting dan relevan. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap platform untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, seberapa efektifkah partisipasi publik ini dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa partisipasi publik adalah kunci utama dari prinsip demokrasi. Dalam konteks pengambilan keputusan pemerintah, partisipasi publik memungkinkan berbagai perspektif, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat untuk

diakomodasi. Hal ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, karena didasarkan pada masukan langsung dari masyarakat yang akan terkena dampaknya.

Di era digitalisasi, partisipasi publik dapat terwujud melalui berbagai platform online, seperti survei daring, forum diskusi, atau platform media sosial. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas, mengakomodasi suara dari beragam lapisan masyarakat tanpa terbatas oleh faktor geografis atau sumber daya. Sebagai contoh, dalam proses perumusan kebijakan lingkungan, masyarakat dapat memberikan masukan melalui platform daring tentang kekhawatiran mereka terhadap isu lingkungan yang relevan.

Namun, meskipun terdapat potensi besar dalam partisipasi publik di era digitalisasi, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Hal ini dapat menyebabkan suara dari kelompok yang kurang mampu atau terpinggirkan menjadi terabaikan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam arti luas, partisipasi mengacu pada pemberdayaan dan keterlibatan. Jika pemerintah memperbolehkan warganya untuk berpartisipasi, maka partisipasi adalah mungkin. Setiap langkah dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk perumusan, implementasi, penilaian, dan pengambilan keputusan, harus melibatkan partisipasi. Keterlibatan masyarakat lebih dari sekedar kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi bukan itu saja. Dalam kerangka paradigma tata kelola yang baik, keterlibatan publik dapat dipahami sebagai sebuah layanan yang integral dan mendasar, dan tata kelola komunitas sebagai pemerintahan yang berpusat pada warga negara. Sebagai model pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif menjadi pemain utama dalam pertumbuhan pemerintahan, keterlibatan masyarakat sangatlah penting.

Tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk meningkatkan pengelolaan keterlibatan masyarakat dan kontak dunia usaha-industri. Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kontak antara pemerintah, komunitas bisnis, industri, dan masyarakat diperkirakan akan dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi. Teknologi dapat mengotomatiskan prosedur administratif yang memakan waktu dan monoton.

Media teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti situs web pemerintah atau pemerintahan elektronik (e-Government), dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi, transparansi, partisipasi, penilaian, kontrol, dan kontak publik dalam rangka pembangunan daerah. Selain itu, Anda dapat memanfaatkannya sebagai platform digital untuk transparansi, akuntabilitas publik, serta transmisi dan penyebaran informasi.

Masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan publik melalui perangkat seluler dengan lebih cepat dan mudah jika pemerintah menggunakan teknologi, seperti mengembangkan aplikasi seluler yang disesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi ini mungkin mencakup fungsi seperti mengajukan keluhan, melacak status permohonan, melaporkan masalah, atau menerima peringatan penting. Dengan memfasilitasi komunikasi real-time dengan pemerintah, aplikasi seluler mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengunjungi kantor pemerintah (Wiranti & Frinaldi, 2023).

Prosedur pelayanan publik biasanya panjang, berbelit-belit, dan ambigu. Aktivitas e-Government merupakan hasil dari seringnya negara-negara dan perusahaan-perusahaan menghabiskan waktu untuk layanan dasar (seperti pergi mendapatkan layanan atau bahkan mengantri dan menunggu layanan). Hal ini menyebabkan peningkatan pengeluaran dan ketidakbahagiaan. Hal ini mendorong penggunaan layanan pemerintah online secara keseluruhan, yang menurunkan birokrasi, menyediakan akses 24/7, transaksi cepat dan mudah, dan terbukti meningkatkan kualitas layanan dalam hal ketepatan waktu, konten, dan aksesibilitas.

Tercapainya tujuan tersebut menunjukkan betapa suksesnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah semakin mudah berkomunikasi dua arah. Masyarakat dapat menggunakan jajak pendapat online, forum diskusi, dan platform media sosial untuk menyuarakan pemikiran mereka, memberikan kritik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas dibangun, standar pelayanan publik ditingkatkan, dan ikatan antara masyarakat umum dan masyarakat diperkuat.

3.2. Faktor Penghambat dalam Mengintegrasikan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Pemerintah di Era Digital

Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah menjadi semakin penting. Namun, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat upaya untuk mewujudkan partisipasi publik yang efektif. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat kemajuan keterlibatan masyarakat yang inovatif: Perencanaan, sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, sarana dan prasarana (infrastruktur), serta rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang menjadi pertimbangan penyelenggara negara dalam mengambil keputusan di era digital. Faktor hambatan yang mungkin berdampak pada standar keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kualitas informasi yang ditemukan di situs web di era

digital, khususnya yang berkaitan dengan topik seperti kepemimpinan, infrastruktur ICT, manajemen informasi, lingkungan bisnis swasta, sumber daya manusia, dan masyarakat (SY, 2022).

Salah satu faktor penghambat utama adalah akses terhadap teknologi. Meskipun perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan partisipasi publik secara daring melalui platform online, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat teknologi. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital yang menghalangi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Meskipun seseorang memiliki akses terhadap teknologi, namun jika kurangnya pemahaman akan cara menggunakan platform digital atau kurangnya keterampilan dalam mengekspresikan pendapat secara efektif, partisipasi publik dapat terhambat.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga tantangan dalam mengelola dan menganalisis jumlah besar data yang dihasilkan melalui partisipasi publik dalam era digital. Pentingnya memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya mewakili suara sebagian kecil masyarakat atau data yang bias, namun juga mencerminkan keragaman pandangan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Pada era digital yang semakin maju, akses internet telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Namun, masih ada banyak faktor penghambat yang menghalangi keterhubungan digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan akses internet yang lebih luas dan merata di masyarakat.

Salah satu faktor penghambat utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai. Di banyak daerah, terutama pedesaan, infrastruktur teknologi dan jaringan internet masih terbatas, bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini membuat masyarakat di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan akses internet yang memadai. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memungkinkan akses internet yang lebih luas menjadi langkah yang sangat penting.

Selain itu, kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak masyarakat, terutama yang lebih tua atau dari latar belakang ekonomi rendah, mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi dan internet. Oleh karena itu, pelatihan

literasi digital perlu diberikan kepada masyarakat secara luas agar mereka dapat memanfaatkan internet dengan efektif dan aman.

Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang mendukung keterhubungan digital yang lebih luas. Kebijakan yang mendukung penetrasi internet di daerah terpencil, insentif untuk penyedia layanan internet di daerah yang kurang terjangkau, dan perlindungan konsumen dalam penggunaan internet adalah contoh-contoh kebijakan yang dapat membantu mengatasi hambatan akses internet. Tidak hanya dari sisi pemerintah, sektor swasta juga perlu terlibat dalam upaya mengatasi hambatan akses internet. Kemitraan antara pemerintah dan swasta sangatlah penting dalam suatu kebijakan publik di era digitalisasi tersebut

4. SIMPULAN

Digitalisasi keterlibatan publik sangat membantu pengambilan keputusan pemerintah mengenai amandemen konstitusi. Memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih lancar antara masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu pendekatan untuk menilai keberhasilan keterlibatan masyarakat dalam penerimaan keputusan pengelolaan negara. Melalui survei online, forum diskusi, dan platform media sosial, masyarakat dapat menyuarakan ide, memberikan kritik, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas dibangun, standar pelayanan publik ditingkatkan, dan ikatan kemasyarakatan diperkuat. Sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan (leadership), dan kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang menghambat berkembangnya inovasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan internal tata kelola negara di era digital. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi elektronik di masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tata kelola adalah rendahnya keterlibatan Masyarakat

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., & Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance*, 28.
- Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 2(1).
- Febriantikaningrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved from <https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi-publik-dalam-pemerintahan-di-era-digital-lxaHx>

- Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: A Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. *Sustainability (Switzerland)*, 12 (20).
- Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). *Rethinking public participation in the smart city. ... /Le Géographe Canadien*.
- Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 10 (9).
- Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. *Cities*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019. *JOM FISIP*, 8 (1).
- Rakhmat, J. (1993). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ramdani, D. F., & Habibi, F. (2017). Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart City di Kota Bandung. *Seminar Nasional Riset Terapan*. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/436>
- Reza, J. . (2017). Fase Kemajuan Teknologi Dari Masa Ke Masa. Retrieved from <https://www.liputan6.com/tekno/read /3157705/5 Fase-kemajuan-Teknologi-Dari-Masa-kemas>.
- RI. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. , (2009).
- RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. , (2014).
- Ricky, M. T. A. R. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12 (2).
- Sugiyono, D. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.
- Suwondo. (2011). *Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- SY, H. C. (2022). Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- Verihubs. (2022). Digitalisasi adalah Proses Fundamental di Era Modern, Simak di Sini! Retrieved from Verihubs website: <https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/>
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (2).